

**Ideologi Bahasa Politik Soekarno:
Sarana Ketahanan, Keamanan, dan Perdamaian Indonesia**
Ideology of Soekarno Political Language: Means of Indonesia Resilience, Security and Peace

**David Samuel Latupeirissa^a, I Ketut Darma Laksana^b,
Ketut Artawa^c, I.G.AG. Sosiawati^d**

^aSTIBA Mentari Kupang, ^{b,c,d} Universitas Udayana Denpasar
Pos-el: Apit_1@yahoo.com

Abstrak

Sulit dipungkiri bahwa ideologi yang Pancasilais, yang merupakan dasar negara Indonesia, sedang menghadapi ancaman. Bertolak dari fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengangkat ideologi bahasa politik Soekarno selaku salah satu tokoh pendiri bangsa dan proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahasa politik Soekarno sebagai sarana ideologi (bdk. Fairclough 1995) perlu digali demi dijadikan bahan refleksi untuk memperkuat akar pencegah erosi ideologi bangsa, agar ketahanan, keamanan, dan kedamaian negara dapat tetap berlangsung. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk (1) menggali ideologi yang terkandung dalam bahasa politik Soekarno selaku salah satu tokoh pendiri bangsa dan proklamator kemerdekaan NKRI, (2) menggali motivasi yang ada di balik lahirnya ideologi dalam bahasa tersebut, dan (3) melihat perubahan sosial budaya sebagai dampak dari ideologi bahasa politik Soekarno. Untuk mencapai ketiga tujuan penelitian di atas, peneliti menggunakan Teori Analisis Wacana Kritis (AWK) model Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006) sebagai teori utama, dan teori Ideologi sebagai teori pendukung. Metode yang diterapkan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi, sedangkan metode yang diterapkan dalam analisis data adalah metode deskriptif kualitatif yang diterapkan berdasarkan tiga level analisis AWK Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ideologi yang terkandung dalam bahasa Soekarno adalah Ideologi ‘persatuan dan kesatuan sebagai hal yang penting’, Ideologi ‘revolusi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia’, dan Ideologi ‘Imperialisme sebagai musuh utama bangsa Indonesia’. Ideologi tersebut perlu dihidupi sebagai salah satu strategi demi menjaga ketahanan, keamanan, dan perdamaian Indonesia. Selanjutnya, ideologi tersebut dilatari oleh keadaan bangsa yang plural dan kesadaran bahwa sifat statis adalah penghalang kemajuan bangsa. Kandungan ideologi dimaksud membawa perubahan dalam cara berkomunikasi dan cara hidup bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Ideologi, Bahasa Politik, Analisis Wacana Kritis

Abstract

It is difficult to be denied that Pancasila ideology, as the foundation of Indonesia state, is facing a threat. Based on the phenomenon, this research was conducted to raise the ideology of Soekarno's political language. Soekarno's political language as a means of ideology (eg, Fairclough 1995) needs to be explored, to serve as a reflection in strengthening the root of preventing nation's ideological erosion. This will sustain the state security, peace, and state endurance. Specifically, this study aims: (1) to explore the ideology conceived in Soekarno's political language as one of the nation founding fathers and the proclaimer of Indonesia independence, (2) to explore the motivations behind the birth of ideology in the language, and (3) to see the socio-cultural changes as the result of Soekarno's political ideology. To achieve the research objectives, researcher used Critical Discourse Analysis Theory (CDA) of Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006) as the main theory, and the theory of Ideology as a supporting theory. The method applied in data collection was documentation method, while the method applied in data analysis was descriptive qualitative method that applied based on three analysis levels of Fairclough CDA theory. The results show that the ideology contained in Soekarno's political

language is the ideology of 'unity as an important thing', the ideology of 'revolution as an integral part of the Indonesian nation soul', and the ideology of 'Imperialism as the main enemy of the Indonesia'. The ideology needs to be lived for the sake of Indonesia's endurance, security and peace. Furthermore, the ideology is based on a plural nation state and the realization that static nature is a barrier to the progress of a nation. The ideology contents have brought changes in the way of communication and the way of Indonesian nation life.

Key Words: *Ideology, Political Language, Critical Discourse Analysis*

PENDAHULUAN

Secara fenomenologis, Bangsa Indonesia memiliki ketahanan dan keamanan negara yang cukup kondusif. Walau demikian, sulit dipungkiri bahwa bangsa ini juga mengalami ancaman pengikisan ideologi dasar negara, seperti yang juga dialami oleh berbagai negara berkembang lainnya. Gerakan terorisme untuk mengganti Pancasila kerap terjadi. Ideologi yang Pancasila, yang merupakan jiwa bangsa Indonesia, sedang menghadapi ancaman dari pihak tertentu. Ancaman ini perlu disikapi secara bijak dan tegas demi keberlangsungan dan keamanan, serta kedamaian bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menyikapi fenomena seperti yang sudah disebutkan di atas. Hal ini mengandung urgensi yang tinggi mengingat keberlangsungan dan keamanan, serta kedamaian bangsa Indonesia merupakan sebuah *das sollen* yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Sayangnya, seperti yang telah dipaparkan, terdapat *das sein* yang menunjukkan bahwa ideologi bangsa Indonesia yang Pancasila, di sisi lain, sedang mengalami erosi. Berkaitan dengan hal itu, akar pencegah erosi ideologi bangsa perlu diperkuat. Salah satu cara memperkuat akar pencegah erosi ideologi bangsa adalah dengan menggali ideologi yang terkandung dalam bahasa politik Soekarno. Kandungan ideologi dalam bahasa politik Soekarno, selaku salah satu pendiri dan proklamator bangsa, merupakan elemen pembentuk dasar negara yang perlu dilestarikan. Galian ideologi bahasa politik tersebut dapat dijadikan bahan refleksi demi merajut kembali nilai bangsa, sebagai strategi dalam memperkuat ketahanan jiwa bangsa Indonesia. Selain itu, hasil penelitian mengenai ideologi bahasa pendiri NKRI dapat dijadikan warisan budaya bagi generasi mendatang.

Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengungkap ideologi yang terkandung dalam bahasa politik Soekarno selaku salah satu tokoh pendiri bangsa dan proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (2) menggali motivasi yang ada di balik lahirnya ideologi dalam bahasa politik Soekarno, dan (3) melihat perubahan sosial budaya sebagai dampak dari ideologi bahasa politik Soekarno.

Selanjutnya, sejauh penelusuran peneliti, belum pernah ada penelitian ilmiah yang menggali kandungan ideologi dalam bahasa Politik Soekarno sebagai sarana ketahanan,

keamanan, dan kedamaian Bangsa Indonesia. Fakta ini membuat penelitian mengenai ideologi bahasa politik Soekarno sebagai penelitian yang memiliki kadar novelitas yang tinggi. Beberapa penelitian yang bersinggungan dengan penelitian ini antara lain penelitian Scott *et al* (2001), Jupriono (2010), dan Sosiowati (2013).

Scott *et al* (2001), membahas mengenai bahasa politik Bung Karno dalam salah satu bagian dari buku mereka yang berjudul '*100 Tahun Bung Karno: Sebuah Liber Amicorum*'. Pembahasan mereka mengenai Bahasa Soekarno bersifat umum tanpa membahas ideologi di balik bahasa tersebut. Di sisi lain, buku ini mengandung kadar ilmiah yang rendah. Dengan kata lain, buku ini tergolong buku semi-ilmiah. Dikatakan demikian karena di dalamnya para penulis tidak menyertakan data konkrit, atau menjelaskan teknik pengumpulan data yang sah, maupun metode analisis data, serta teori yang digunakan. Para penulis hanya sekedar menyatakan bahwa Soekarno piawai dalam berbahasa dan dalam memainkan kata-katanya di panggung pidato, tanpa melihat secara khusus ideologi yang ada di balik bahasa Soekarno. Pembahasan Scott *et al* (2001) berbeda dengan penelitian ini. Penelitian pada makalah ini merupakan penelitian ilmiah menggunakan teori AWK model Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006), serta menggunakan metode penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu, penelitian pada makalah ini dikhususkan untuk melihat ideologi yang terkandung dalam bahasa politik Soekarno, sebagai bagian dari sarana ketahanan, kemanan, dan perdamaian bangsa Indonesia.

Jupriono (2010) meneliti bahasa politik pada pidato kenegaraan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai suatu kajian wacana kritis latar historis. Teori yang digunakan adalah teori Analisis Wacana Kritis model van Dijk (2001). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pidato kenegaraan Presiden SBY secara maksimal telah memanfaatkan latar wacana historis untuk menggiring pemahaman publik Indonesia. Dalam rangka membangun citra diri serba positif, Presiden SBY mengungkapkan secara eksplisit dinamika kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial dalam sepuluh tahun pertama era reformasi. Secara implisit, SBY menggiring persepsi publik bahwa ia merupakan presiden yang memiliki legitimasi tinggi sebagai produk pemilu yang demokratis. Selain itu, SBY juga mengonstruksi pemahaman publik bahwa beliau berjasa besar dalam terbentuknya dinamika kemajuan kehidupan rakyat Indonesia. Hasil penelitian Jupriono (2010) menyatakan bahwa SBY adalah presiden yang lebih piawai mengeksploitasi pidato kenegaraan sebagai media dan strategi politik pencitraan (*politic of imagology, imagery politic*). Namun, dalam penelitiannya, analisis elemen detail wacana dan pengandaian wacana (van Dijk, 2001) tidak dibahas. Kaitannya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, yaitu bahasa politik seorang presiden Indonesia. Walau demikian, seperti yang sudah disebutkan,

Jupriono (2010) meneliti bahasa dalam pidato presiden SBY sedangkan makalah ini meneliti tentang ideologi yang terkandung dalam bahasa politik presiden Soekarno.

Sosiowati (2013) meneliti perihal bahasa politikus dalam acara talk show di Metro TV. Tujuan penelitiannya adalah untuk mencari, menemukan, dan menganalisis penggunaan bahasa kaum politikus dalam talk show “Today’s Dialogue”, menemukan dan menganalisis ciri-ciri satuan verbal bahasa yang digunakan oleh para politikus dikaitkan dengan kesantunan dan ketidaksantunan, menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan bahasa para politikus serta menemukan dan menganalisis ideologi yang tersirat di balik penggunaan bahasa para politikus. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa politikus yang menjadi narasumber dalam talkshow, yang berasal dari partai politik yang berbeda, melakukan pelanggaran atau aplikasi maksim kesantunan untuk mencapai tujuan dan mengekspresikan ideologi mereka. Di sisi lain, walaupun para politikus dimaksud melakukan pelanggaran maksim, secara keseluruhan, mereka adalah politikus santun. Kemiripan penelitian Sosiowati (2013) dan penelitian pada makalah ini terletak pada subjek penelitiannya, yaitu sama-sama menyangkut bahasa politik, serta salah satu tujuan penelitiannya yang bermaksud menguak ideologi di balik bahasa politik. Namun, penelitian Sosiowati (2013) menganalisis bahasa politik menggunakan teori sosiopragmatik sebagai teori utama sedangkan penelitian ini menggunakan teori AWK. Selain itu, penelitian Sosiowati (2013) tidak membahas bahasa Soekarno selaku tokoh proklamator dan pendiri bangsa Indonesia.

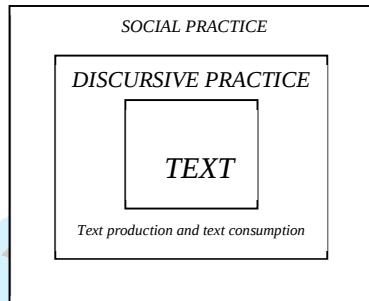
Demikianlah mengapa penelitian pada makalah ini tergolong sebagai penelitian yang memiliki tingkat urgensi serta novelitas yang tinggi, dilihat dari masalah yang melatari penelitian ini, dan tujuan penelitiannya, serta tinjauan pustaka yang bersinggungan dengan topik penelitian. Selanjutnya akan dipaparkan teori utama yang digunakan, serta metode penelitian yang diterapkan. Setelah itu, peneliti akan memaparkan hasil penelitian di bagian pembahasan.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori AWK model Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006), dan teori Ideologi sebagai teori pendukung. Teori AWK digunakan untuk membedah permasalahan ilmiah secara umum, yaitu untuk melihat teks, dan apa yang ada di balik teks, sedangkan teori Ideologi digunakan untuk menguak dan memilah ideologi Bahasa Soekarno. Berikut ini dipaparkan teori AWK dan teori Ideologi secara praktis.

Berdasarkan pandangan teori AWK, setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk perjuangan dan pertarungan kekuasaan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahasa politik Soekarno merupakan bentuk perjuangan dan pertarungan yang memuat ideologi

tertentu. Lebih lanjut, Fairclough (1995a) mengatakan bahwa teks dinilai sebagai ranah representasi dan signifikasi dunia dan pengalaman serta terbuka untuk berbagai interpretasi. Untuk memahami wacana secara utuh, menurut Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006), perlu ada tiga tingkatan atau aspek analisis yang dilakukan. Pertama adalah analisis level teks, kedua adalah analisis praktik diskursif yang menyangkut praktik produksi teks dan konsumsi teks, dan yang terakhir adalah analisis praktik sosio-kultural. Ketiga tingkatan analisis tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Dimensi Wacana Menurut Fairclough
 Sumber: Jørgensen, Marriane dan Phillips, Louise J. (2002:68)

Analisis teks dilakukan secara sintaksis, paradigmatis ataupun kombinasi keduanya. Analisis sintaksis bermaksud melihat kosa kata yang dipakai, semantik dan kalimat. Analisis ini juga menekankan koherensi dan kohesivitas, bagaimana relasi antarkata dan antarkalimat membentuk pengertian tertentu. Analisis paradigmatis adalah analisis teks dengan memerhatikan simbol atau tanda-tanda yang digunakan dalam teks untuk menemukan makna secara keseluruhan (Jørgensen, dkk., 2010:127). Dalam penelitian ini, analisis paradigmatis dan sintaktikal dalam level ini dipakai untuk menelaah masalah penelitian yang pertama, yaitu untuk menguak ideologi dalam wacana pidato Soekarno.

Dalam analisis level praktik diskursif, yang ditelaah dalam AWK Fairclough (1989, 1995, 2005, 2006) adalah proses produksi dan proses konsumsi teks. Fairclough (dalam Jørgensen dkk, 2010) menekankan kaitan praktik diskursif dengan kondisi kewacanaan dan non-kewacanaan yang mempengaruhi produksi wacana atau konstruksi realitas (wacana) oleh suatu kekuatan sosial. Analisis pada level ini dilakukan dengan mengaitkan teks dan praktik. Interpretasi teks atau gejala dalam dirinya diikuti dengan penafsiran terhadap bentuk praktik diskursif menyangkut apa yang ada di balik wacana. Analisis pada level ini digunakan untuk membedah masalah penelitian kedua, yaitu aspek 'kemengapaan' atau motivasi yang melahirkan ideologi bahasa Soekarno.

Level ketiga adalah praktik sosiokultural. Teori AWK Fairclough pada level ketiga menganalisis tatanan wacana yang ada dan bagaimana aktor-aktor sosial mencoba merubah atau

mendukung tatanan wacana tersebut (bdk. Jorgensen, 2010. Latupeirissa, 2014). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar praktik kewacanaan mempengaruhi bagaimana wacana muncul dan menampilkan dirinya. Praktik sosio-kultural memang tidak berhubungan langsung dengan teks tetapi menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami melalui perantara praktik diskursif. Analisis teori AWK Fairclough yang dilakukan pada tahapan ini disebut sebagai eksplanasi atau analisis sosial, yang terdiri dari tingkat situasional (konteks sosial yang khas ketika wacana muncul), institusional (pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana), dan yang terakhir adalah societal (aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan yang menentukan siapa yang berkuasa, nilai-nilai apa yang dominan dan mempengaruhi proses produksi wacana) (bdk. Jørgensen dkk, 2010:131). Analisis pada level ini digunakan untuk menjawab permasalahan ilmiah ketiga, yaitu menjelaskan perubahan sosial budaya sebagai dampak dari ideologi bahasa politik Soekarno.

Selanjutnya, teori ideologi diterapkan sebagai teori pendukung. Ideologi memiliki definisi beragam dan kompleks sebagai akibat dari banyaknya interpretasi yang muncul. Menurut Thompson (2004:17), secara teoritis ideologi menunjuk pada dua hal yang berbeda. Pertama, ideologi digunakan sebagai sebuah konsep yang murni deskriptif, yakni sebagai sistem berpikir, sistem kepercayaan, dan praktik simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Penggunaan istilah ini memunculkan apa yang disebut dengan konsepsi netral (*neutral conception*) tentang ideologi. Kedua, konsep ideologi secara mendasar dikaitkan dengan segala proses pembenaran hubungan kekuasaan yang tidak simetris dan seluruh representasi dalam proses pembenaran dominasi. Penggunaan istilah kedua menimbulkan konsepsi kritis ideologi (*critical conception of ideology*).

Ideologi merupakan salah satu konsep sentral dalam AWK karena setiap bentuk teks, percakapan, dan sebagainya dipandang sebagai praktik ideologi atau pancaran ideologi tertentu (Sosiowati, 2013: 18). Sejalan dengan pendapat tersebut, Takwin (2009) menyatakan bahwa bahasa merupakan instrumen untuk menyebarkan ideologi. Thompson (1984) mendefinisikan ideologi sebagai suatu sistem berpikir, sistem kepercayaan, praktik-praktik simbolik yang berhubungan dengan (1) tindakan sosial dan politik, (2) proses pembenaran hubungan kekuasaan yang tidak simetris dan (3) pembenaran dominasi. Ideologi berperan sebagai perekat hubungan sosial yang mengikat anggota masyarakat secara bersama dengan menetapkan nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati secara kolektif (Thompson, 1984). Dalam ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu (bdk. Fiske, 2012).

Berdasarkan pendapat di atas, ideologi dimaknai sebagai penentu cara pandang seseorang atau sekelompok orang. Cara pandang yang digerakkan oleh ideologi mempengaruhi pikiran, selera, perasaan, selain menuntut tindakan kebudayaan, dan tindakan sosial seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pengetahuan, struktur kelas, konflik antarkelas, interest kelas, cara produksi struktur ekonomi, dan bentuk-bentuk pengetahuan dalam praktik-praktik sosial yang spesifik (bdk. Kress. 1985:27). Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Fiske (2012 : 208) yang mengatakan bahwa ideologi merupakan tindakan. Artinya, ideologi secara aktif membentuk kelakuan individu dan sekelompok masyarakat.

Konsep ideologi dalam penelitian ini merupakan konsep gabungan dari pernyataan Thomson (1984), Kress (1985) dan Fiske (2012). Ideologi dipandang sebagai sistem berpikir atau cara pandang dan sistem keyakinan dari Soekarno yang terperi dalam bahasa politiknya, yang mana ideologi tersebut bertindak aktif dalam mempengaruhi cara berpikir masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial budaya dari masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan teknik *purposive sampling*. Data diambil di kantor ANRI Jakarta dan Perpustakaan Nasional RI Jakarta. Di kantor ANRI, terdapat 919 dokumen asli tulisan dan pidato Soekarno sebagai seorang presiden. Dokumen yang dijadikan data diambil sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan kata lain, tidak semua pidato politik dan tulisan Soekarno diambil sebagai sumber data. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, terdapat sebuah dokumen yang diambil untuk dijadikan potret dari keseluruhan bahasa politik Soekarno. Hal ini lumrah dan berterima dalam penelitian kualitatif. Selain itu, potret data yang terpilih dari 919 pidato merupakan hasil kaji banding peneliti, sehingga pidato yang terpilih diasumsi sebagai teks asli yang merupakan kristalisasi dan akumulasi gagasan Soekarno. Kristalisasi dan akumulasi gagasan Soekarno dimaksud, yang dijadikan data dalam dalam penelitian ini adalah pidato berjudul ‘Tahun Berdikari’. Selanjutnya pidato politis ini dibandingkan dengan dokumen pidato dengan judul yang sama, yang tersimpan di Perpustakaan Nasional RI Jakarta.

Alasan pemilihan pidato politis Soekarno berjudul ‘Tahun Berdikari’ disampaikan sebagai berikut. Pidato Soekarno sebagai seorang Presiden pada tanggal 17 Agustus 1965 merupakan pidato yang sangat penting setelah masa kemerdekaan. Tahun 1965 adalah tahun yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada masa itu stabilitas negara Indonesia sedang terancam. Pembunuhan para jendral penting di Indonesia terjadi sebulan setelah Soekarno menyampaikan pidato ini. Dengan kata lain, sebagai seorang presiden, Soekarno telah merasakan gejolak batin

bangsa, sehingga sebagai seorang Presiden, tentu Soekarno mencurahkan kemampuan terbaiknya melalui pidato kenegaraan 17 Agustus 1965. Permainan bahasa demi merasuk dan mempengaruhi rakyat Indonesia dipentaskan Soekarno dalam pidatonya berjudul ‘Tahun Berdikari’. Di sisi lain, pidato kenegaraan demi memperingati kemerdekaan Bangsa Indonesia di tahun 1965 mengandung pokok pikiran Soekarno dalam 20 tahun pemerintahannya. Hanya ini satu- satunya pidato yang mengangkat kembali pokok pikiran Soekarno sejak tahun 1945- 1965. Dengan kata lain, pidato berjudul ‘Tahun Berdikari’ merupakan pidato yang berisi ideologi Soekarno secara lengkap.

Selanjutnya, pidato berjudul ‘Tahun Berdikari’ dijadikan korpus data untuk kemudian disaring menjadi data penelitian. Setelah mendapatkan data penelitian, peneliti mengolah data dan mendeskripsikannya dengan pendekatan kualitatif. Deskripsi hasil penelitian didasarkan pada tiga tingkatan analisis wacana kritis model Fairclough.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti memaparkan analisis data dan hasil penelitiannya, yaitu mengenai (1) Ideologi yang terkandung dalam bahasa politik Soekarno selaku salah satu tokoh pendiri bangsa dan proklamator kemerdekaan NKRI, (2) motivasi yang ada di balik lahirnya ideologi dalam bahasa tersebut, dan (3) perubahan sosial budaya sebagai dampak dari ideologi bahasa politik Soekarno. Ketiga poin pembahasan tersebut didasarkan pada data yang diambil dari pidato politis Soekarno berjudul ‘Tahun Berdikari’. Pidato ini terdiri dari 145 segmen, atau dalam tulisannya, terdiri atas 145 paragraph . Keseluruhan kata yang digunakan dalam pidato ini berjumlah 11.788 kata. Dari hasil analisis data, dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Ideologi Bahasa Politik Soekarno

Penelusuran ideologi bahasa politik Soekarno merupakan pembahasan level pertama dalam AWK Fairclough, yaitu analisis level teks. AWK melihat teks sebagai kendaraan ideologi (Fairclough, 1989). Ideologi tersebut tersembunyi dalam konstruksi wacana serta leksikon yang digunakan. Berikut ini dipaparkan ideologi yang terkandung dalam bahasa politik Soekarno. Ideologi yang dipaparkan dibatasi pada 3 (tiga) ideologi utama yang memiliki presentasi kehadiran terbesar dalam wacana bahasa politik Soekarno. Ketiga ideologi tersebut adalah (1) Persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang penting, (2) Revolusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, dan (3) Imperialisme dan kapitalisme adalah musuh utama bangsa Indonesia.

1.1. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang penting.

Berdasarkan data, pemikiran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu ideologi penggerak bahasa politik Soekarno. Dengan kepiawaiannya berbahasa, Soekarno menyuntikkan ideologi persatuan ke dalam bahasa politiknya ketika beliau

menyampaikan pidato kenegaraan. Seperti yang sudah dinyatakan, ideologi dimaksud termuat dalam leksikon dan konstruksi wacana yang dipakai.

Dalam pidatonya, Soekarno mengonstruksi wacana mengenai mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dari 145 segmen, Soekarno menggunakan 37 segmen untuk mengajak segenap bangsa Indonesia bersatu. Hal ini terperi melalui gagasan utama/ ide pokok dari setiap segmen.

Pertama, dalam segmen kedua, Soekarno menyatakan secara khusus mengenai ‘kesatuan hati pemimpin dan rakyat Indonesia’ sebagai gagasan utamanya. Soekarno mempresentasikan dirinya sebagai pemimpin yang hatinya bersatu dengan hati segenap rakyat Indonesia. Menurutnya, persatuan dan kesatuan adalah hal mutlak yang dibutuhkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini didukung dalam pemaparan gagasan utamanya pada segmen ke- 16.

Segmen ke- 16 mengangkat topik utama yang menyatakan bahwa semboyan ‘bersatu’, ‘berjuang’, dan ‘berkuasa’ diperlukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Gagasan utama ini diteruskan dalam pembahasaan pidatonya di segmen ke- 17. Pokok pikiran segmen ke- 17 adalah ‘persatuan dan kesatuan merupakan jalan keluar dari masalah- masalah yang dihadapi setelah masa kemerdekaan. Demikianlah Soekarno bukan hanya mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan sebagai hal mutlak yang harus diusahakan untuk mempertahankan kemerdekaan, namun juga menyatakan bahwa masalah- masalah yang dihadapi pada masa setelah kemerdekaan dapat diatasi dengan jalinan persatuan dan kesatuan bangsa. Masalah- masalah bangsa dapat diatasi dengan persatuan dan kesatuan juga dinyatakan oleh Soekarno dalam gagasan utamanya di segmen ke- 69.

Selanjutnya, gagasan utama segmen ke- 21 adalah ajakan untuk mempertahankan jiwa proklamasi, yaitu jiwa yang merdeka secara nasional, jiwa ikhlas, jiwa persatuan, dan jiwa pembangunan. Sekali lagi Soekarno menyatakan bahwa jiwa persatuan merupakan salah satu jiwa proklamasi kemerdekaan NKRI yang harus dipertahankan. Gagasan utama ini diteruskan dalam segmen ke- 22, yang mengandung gagasan utama ‘jiwa persatuan dan gotong royong sebagai daya penyatu yang datang dari azas Pancasila. Pentingnya ideologi persatuan dan kesatuan membuat Soekarno melakukan repetisi gagasan utama dari segmen- segmen sebelumnya. Pengulangan gagasan pokok dilakukan lagi oleh Soekarno dalam segmen ke- 23. Gagasan utama bagian ini adalah ‘Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila’ sebagai senjata melawan kolonialisme dan imperialisme. Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai senjata melawan perpecahan juga termuat dalam gagasan utama segmen ke- 71 dan segmen ke- 94. Pancasila, yang di dalamnya mengandung ideologi Bhineka Tunggal Ika juga terkandung

dalam Panca azimat Soekarno. Panca azimat tersebut dinyatakan oleh Soekarno dalam segmen ke- 73, 74, 75, 109, 130, dan segmen ke- 144. Di sisi lain, segmen- segmen tersebut berisi himbauan Soekarno untuk melawan perpecahan. Himbauan yang merupakan cermin ideologi tersebut juga temuat dalam segmen ke- 44.

Ketiga, Soekarno mengonstruksi ideologi persatuan dan kesatuan dalam pokok pikiran segmen ke- 24. Segmen ke-24 berbicara tentang ‘perlunya penegakan Panca Dharma. Panca Dharma adalah lima pemikiran penting, yaitu: ‘persatuan harus digembleng’, ‘para pemecah bangsa perlu diberantas’, ‘pembangunan di segala bidang harus diteruskan’, ‘perlawanan terhadap imperialisme- kolonialisme harus diteruskan’, ‘pemilihan umum harus diselenggarakan’. Pemikiran kedua dan ketiga dalam Panca Dharma tersebut mengandung ideologi pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Keempat, Soekarno juga mengajak segenap bangsa Indonesia untuk bersama- sama memikirkan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Gagasan utama ini terkandung dalam segmen ke- 39. ‘...bersama- sama’ dalam konstruksi kalimat tersebut merujuk pada makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, melalui cara menyapanya, Soekarno menunjukkan bahwa persatuan perlu dibina. Dalam segmen ke- 34, Soekarno menyapa segenap bangsa Indonesia dengan sebutan ‘Saudara- saudara setanah air dan bangsa; kawan- kawanku secita- cita’. Dalam paragraf ke- 95, Soekarno sekali lagi menyapa segenap rakyat dengan sebutan ‘Saudara- saudaraku setanah- tumpah darah, kawan- kawanku serevolusi...’. Demikianlah Soekarno menyapa masyarakat Indonesia sebagai saudaranya setanah-tumpah darah dan kawan- kawannya. Sapaan tersebut merupakan wujud usaha Soekarno menyatukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sapaan tersebut mengandung ideologi persatuan dan kesatuan sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa. ‘Saudara’ dan ‘kawan’ adalah bentuk persatuan yang diwujudkan dalam bahasa. Sapaan Soekarno yang memuat ideologi persatuan sebagai hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia dapat juga dilihat juga dalam segmen ke- 50, di mana Soekarno memuliakan perhimpunan rakyat, atau persatuan rakyat sebagai hal yang patut dimuliakan.

Selanjutnya, pada segmen- segmen lainnya, Soekarno melakukan repetisi gagasan utama dari hal- hal yang sudah disebutkan di atas. Repetisi adalah salah satu karakteristik bahasa politik Soekarno. Repetisi dilakukannya untuk memastikan bahwa ideologi yang disuntikkannya benar- benar diresapi oleh bangsa Indonesia.

Secara semantis, terdapat 86 (delapan puluh enam) leksikon yang termasuk dalam medan makna persatuan dan kesatuan bangsa sebagai hal yang penting. Leksikon tersebut

terdiri dari 28 (dua puluh delapan) leksikon ‘persatuan’, 17 (tujuh belas) leksikon ‘bersatu’, 1 (satu) leksikon ‘penyatu’, 1 (satu) leksikon ‘mempersatukan’, 1 (satu) leksikon ‘dipersatukan’, 1 (satu) leksikon ‘menyatukan’, 6 (enam) leksikon ‘bersama’ yang bermakna persatuan, dan 31 (tiga puluh satu) leksikon ‘satu’ yang tidak merujuk pada makna bilangan, tetapi merujuk pada sifat kesatuan.

1.2.Revolusi Sebagai Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Bangsa Indonesia

Ideologi lain yang termuat dalam bahasa politik Soekarno adalah ideologi ‘revolusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia’. Hal ini nampak dari cara Soekarno mengonstruksi wacana dalam bahasa yang tertuang dalam teks pidato politisnya. Dari keseluruhan pidato tersebut, terdapat 39 segmen yang berbicara tentang revolusi. Isi dalam segmen- segmen dimaksud isinya variatif, mulai dari pemikiran bahwa ‘revolusi sebagai suatu hal yang penting dalam kehidupan berbangsa’, ‘revolusi Indonesia adalah revolusi yang hebat’, sampai kepada ‘Indonesia harus terus melakukan revolusi yang berkesinambungan’ demi mencapai kemajuan yang signifikan.

Dalam segmen ketujuh, Soekarno menyatakan pokok pemikiran bahwa banyak revolusi yang sudah terjadi di dunia ini, namun dari semua revolusi tersebut, revolusi kemerdekaan Indonesia adalah revolusi yang terhebat. Selanjutnya, dalam segmen ke- 25, dinyatakan bahwa Indonesia perlu melaksanakan revolusi secara utuh. Isi segmennya memotivasi segenap rakyat Indonesia untuk terus melakukan revolusi. Tujuan revolusi disesuaikan dengan keadaan bangsa yang harus terus bergerak maju. Ideologi ini juga dapat dilihat dari gagasan utama segmen ke- 26 yang berisi bahwa revolusi menuju demokrasi mutlak diperlukan.

Dalam segmen ke- 28, Soekarno menyatakan bahwa jiwa bangsa Indonesia adalah jiwa revolusi. Soekarno melanjutkan bahasanya yang mengandung ideologi revolusi dengan memaparkan gagasan utama segmen ke- 29 yang berbunyi ‘revolusi itu sendiri perlu dijalankan dari segala arah’. Ideologi dalam bahasa politik Soekarno yang dituangkan dalam pidatonya ini diperkuat dengan gagasan utamanya dalam segmen ke- 30, yang terus memotivasi rakyat Indonesia untuk terus melakukan revolusi. Selanjutnya, Soekarno menerangkan bahwa sifat dari revolusi Indonesia ditandai dengan pergerakan dinamis. Dalam segmen ke-31, Soekarno memberikan gagasan utama yang mengandung makna bahwa penguatan jiwa nasionalisme dilakukan melalui revolusi yang bergerak maju secara mandiri. Demikian juga dalam segmen ke-32, sejalan dengan segmen- segmen sebelumnya, Soekarno menyatakan bahwa revolusi dilakukan dengan mengadakan konfrontasi yang terus menerus.

Demi menyuntikkan ideologi ‘revolusi sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia’, Soekarno menjabarkan enam hukum revolusi dalam segmen ke- 33. Keenam hukum revolusi dimaksud adalah (1) revolusi harus mengambil sikap tepat terhadap kawan dan lawan, (2) revolusi harus dijalankan dari atas dan dari bawah, (3) destruksi dan konstruksi harus dijalankan sekaligus, (4) tahap pertama harus dirampungkan dulu kemudian tahap kedua, (5) harus setia kepada program revolusi sendiri yaitu manipol, dan (6) harus punya sokoguru/ pimpinan yang tepat dan kader-kader yang tepat. Leksikon ‘hukum’ yang digunakan Soekarno mengandung arti bahwa keenam hal tersebut wajib dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia. Hukum sifatnya mengikat. Jika ada yang tidak melakukannya, seyogyanya akan diganjar.

Ideologi mengenai revolusi sebagai jiwa bangsa, juga tersembunyi melalui cara Soekarno menyapa para penerus bangsa. Dalam segmen ke- 41, Soekarno menyebut para pemuda Indonesia sebagai pemuda revolusioner. Dengan menyadari bahwa pemuda merupakan tulang punggung bangsa Indonesia, Soekarno menyiapkan para pemuda Indonesia menjadi para pelaku revolusi. Bukan hanya kepada para pemuda, Soekarno kerap menyebut seluruh rakyat sebagai para revolusioner. Enam kali Soekarno menggunakan sapaan ‘*revolusioner*’ dalam menyatakan gagasan utamanya, yaitu dalam segmen ke- 66, segmen ke- 67, segmen ke- 75, segmen ke- 80, serta segmen ke- 110 dan segmen ke- 132. Hal tersebut menunjukkan bahwa Soekarno berusaha menanamkan ideologi ‘revolusi sebagai jiwa bangsa’ kepada seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini didukung dengan gagasan utama yang Soekarno nyatakan dalam segmen ke- 48, bahwa setiap warga negara Indonesia wajib terlibat dalam revolusi.

Soekarno mengakui bahwa semboyan- semboyan dan singkatan- singkatan atau jargon- jargon yang dibuatnya merupakan tuntutan revolusi. Dengan kata lain, setiap pernyataan Soekarno dalam berbahasa di dalam dunia politik selalu bertujuan untuk revolusi. Hal itu dinyatakan dalam segmen ke- 78 dan segmen ke- 79. Ideologi yang terkandung dalam benak Soekarno, serta yang dituangkan dalam bahasa politisnya berkaitan erat dengan revolusi. Ideologi ini juga tersebar dalam berbagai gagasan utama di segmen lainnya. Gagasan utama tersebut sifatnya mendukung pernyataan- pernyataan seperti yang sudah disebutkan di atas.

Secara semantis, terdapat 204 (dua ratus empat) leksikon yang termasuk dalam medan makna ‘revolusi sebagai hal yang penting dan tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia’. Jumlah tersebut terdiri dari 164 (seratus enam puluh empat) leksikon ‘revolusi’ dan 40 (empat

puluh) leksikon ‘revolusioner’. Jumlah penggunaan leksikon yang sama dalam wacana bahasa politik Soekarno mencerminkan ideologi yang terkandung dalam bahasa itu sendiri.

1.3. Imperialisme dan Kapitalisme adalah Musuh Utama Bangsa Indonesia

Ideologi lain yang terkandung dalam bahasa politik Soekarno adalah ideologi ‘Imperialisme dan Kapitalisme sebagai musuh utama bangsa Indonesia. Pernyataan ini didasarkan pada data bahwa Soekarno berbicara secara khusus mengenai ideologi ini dalam 25 segmen. Ideologi ini adalah topik terbesar ketiga setelah persatuan, dan revolusi. Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara kaya dan berkuasa, mengawal dan menguasai negaranegara lain yang dianggap terbelakang dan miskin dengan tujuan mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di negara tersebut untuk menambah kekayaan dan kekuasaan negara penjajahnya. Dalam imperialisme, terkandung juga unsur kapitalisme.

Dalam menyampaikan pidato politiknya berjudul ‘Tahun Berdikari’, Soekarno mengangkat kembali isi pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan NKRI tanggal 17 Agustus 1954. Soekarno menyimpulkan dan mengulangi makna pidato politiknya bahwa Imperialisme harus dilawan. Dengan tegas dikatakan “*Dengan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dan Pancasila, kita, prinsipil dan dengan perbuatan, berdjoang terus melawan kolonialisme dan imperialisme di mana sadja*”. Pengulangan ini menandakan bahwa pokok pikiran mengenai perlawanan terhadap Imperialisme adalah hal yang harus dilakukan. Demikian juga dalam segmen ke- 24, Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa Panca Dharma perlu ditegakkan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pokok pikiran keempat dari Panca Darma adalah ‘perlawanan terhadap imperialisme- kolonialisme harus diteruskan’.

Ideologi ini tercermin dalam bahasa Soekarno yang membanggakan momentum di mana Indonesia pada akhirnya terlepas dari belenggu Imperialisme. Dalam segmen ke- 42, Soekarno menyampaikan secara khusus bahwa Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang melempar belenggu Imperialisme. Bahkan, Soekarno bukan sekedar menyatakan bahwa Indonesia bangga terlepas dari belenggu Imperialism, namun juga bangga menyatakan bahwa abad XX adalah abad berakhirnya Imperialisme di dunia. Hal tersebut tertuang dalam pokok pikiran segmen ke- 54. Selanjutnya, pada segmen ke- 55 sampai segmen ke- 60, Soekarno berbicara secara khusus, dan berkelanjutan mengenai kekalahan Imperialisme. Jelas terlihat bahwa Soekarno hendak menanamkan ideologi yang memusuhi imperialisme.

Sebagai musuh utama bangsa Indonesia, semua produk Imperialisme ditentang secara lantang oleh Soekarno. Soekarno berbicara dalam segmen ke- 61 tentang bagaimana buku-buku yang ditulis oleh kaum imperialis tidak boleh digunakan sebagai alat ukur revolusi.

Menurutnya, revolusi hanya bisa diukur oleh revolusi itu sendiri, bukan oleh teori- teori dalam buku kaum imperialis. Bukan hanya itu, setiap tulisan surat kabar yang ditulis oleh pers beraliran imperialis juga ditolak oleh Soekarno. Dalam segmen ke- 34, 35, 68, 76, dan ke- 94, Soekarno berbicara tentang bagaimana pers imperialis melawan perjuangan bangsa dengan tulisan- tulisannya di surat kabar, dan bagaimana bangsa Indonesia harus melawan ideologi dalam tulisan- tulisan di surat kabar kaum imperialis. Kritik Soekarno terhadap tulisan- tulisan kaum imperialis dan ajakan Soekarno agar segenap rakyat Indonesia melawan Imperialisme merupakan bentuk pergerakan ideologis bahasa Soekarno itu sendiri.

Demikian juga dengan pernyataan- pernyataan Soekarno yang dibahasakannya sebagai gagasan utama di beberapa segmen lainnya, turut mendukung gagasan- gagasan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Secara semantis, terdapat 76 (tujuh puluh enam) leksikon yang termasuk dalam medan makna imperialisme dan kapitalisme sebagai musuh utama bangsa Indonesia. 30 (tiga puluh) leksikon imperialisme, 40 (empat puluh) leksikon imperialis, dan 6 leksikon kapitalis. Leksikon- leksikon tersebut digunakan sebagai kendaraan ideologi yang menyatakan bahwa Imperialisme dan kapitalisme adalah musuh utama bangsa Indonesia.

2. Motivasi lahirnya Ideologi dalam Bahasa Politik Soekarno

Analisis motivasi lahirnya ideologi yang terperi melalui bahasa politik Soekarno merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari teori AWK. AWK secara khusus melihat faktor ‘kemengapaan’ dari suatu teks atau wacana. Faktor tersebut adalah motivasi yang melatari wacana tersebut, dalam hal ini ideologi dalam bahasa Soekarno. Berdasarkan interpretasi historikal, ditemukan beberapa motivasi yang melatari lahirnya ideologi dimaksud. Motivasi tersebut adalah (1) keadaan bangsa Indonesia yang bersifat plural, dan (2) sifat statis merupakan penghalang kemajuan bangsa.

2.1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, dan budaya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor geografis, dan faktor iklim. Secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra sehingga sering dijadikan sebagai jalur perdagangan Internasional. Sebagai jalur perdagangan, banyak negara- negara asing datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Kondisi ini menciptakan masyarakat multikultural. Dilihat dari struktur geologi, Indonesia terletak di antara tiga lempeng yang berbeda yaitu Asia, Australia, dan Pasifik. Keadaan ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Kehidupan masyarakat setiap pulau berbeda-beda. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh iklim yang berbeda- beda. Berbagai faktor di atas menciptakan Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam ras, suku, agama, dan budaya.

Sebagai bangsa yang plural, perpecahan merupakan ancaman terbesar bangsa. Secara logis, perpecahan lebih mudah terjadi. Setiap ras, suku, agama, dan budaya memiliki pandangan hidupnya masing-masing. Hal ini disadari oleh Soekarno sebagai salah satu pendiri NKRI. Itu sebabnya ideologi yang menggerakkan bahasa politiknya adalah ideologi persatuan sebagai hal yang sangat penting. Jika persatuan dan kesatuan bangsa tidak menjadi prioritas utama maka harapan agar NKRI menjadi bangsa yang kuat, aman, dan damai hanya akan menjadi sebuah cita-cita.

Sebuah bangsa hanya dapat bertahan, dan menjadi semakin kuat serta damai jika ada persatuan di dalamnya. Walau berbeda ras, suku, agama, dan budaya, namun jika ideologi persatuan dijiwai oleh seluruh rakyat dari berbagai golongan, niscaya bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang jaya. Hal ini berlaku bagi bangsa Indonesia. Dengan ideologi persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat atau golongan tertentu yang berasal dari pandangan agama dan budaya yang berbeda akan menghormati masyarakat atau golongan lain yang berbeda agama atau budayanya. Sebaliknya, jika tidak ada ideologi persatuan dan kesatuan bangsa, perbedaan yang ada akan menjadi pemicu perpecahan bangsa Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, hal tersebut disadari dan diantisipasi oleh Soekarno.

Penekanan ideologi persatuan dan kesatuan akan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Selain itu, ideologi ini membantu segenap rakyat Indonesia menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Dengan persatuan, seluruh bangsa akan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Hal-hal tersebut merupakan jalan utama menuju kondisi bangsa yang damai, aman, dan bertahan.

2.2. Sifat statis merupakan penghalang kemajuan bangsa

Motivasi kedua yang melatari lahirnya ideologi dalam bahasa politik Soekarno adalah kesadaran akan sifat statis yang akan menjadi penghalang kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang baru merdeka (dalam hal ini, baru 20 tahun merdeka), bangsa Indonesia masih tergolong sebagai negara 'baru' yang belum bisa menyaingi negara-negara berkembang dan negara-negara maju lain yang sudah berdiri sebelum tahun 1945. Walau demikian, Soekarno sebagai salah satu tokoh pendiri NKRI dan salah satu tokoh proklamator kemerdekaan, tidak berkecil hati.

Cita-cita Soekarno adalah membawa bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain yang sudah lebih dulu melangkah dalam perpolitikan dan perekonomian dunia. Untuk itu,

Soekarno berusaha untuk menghipnotis seluruh rakyat Indonesia agar terus melakukan revolusi dan terus melawan imperialisme dan kapitalisme di Indonesia.

Revolusi merupakan perubahan sosial-budaya yang berlangsung secara cepat. Ukuran kecepatan dimaksud sifatnya relatif. Perubahan dalam revolusi berkaitan dengan perubahan dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan. Inti dari revolusi adalah tetap bergerak maju untuk keadaan yang lebih baik.

Sebagai bangsa yang memiliki keadaan alam yang kaya, bangsa Indonesia cenderung merasa nyaman dengan kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1983. Kecenderungan tersebut cukup beralasan karena dengan kekayaan alamnya, kebutuhan akan sandang dan pangan rakyat dapat terpenuhi dengan mudah. Namun, rasa nyaman tersebut dikhawatirkan akan membuat rakyat menjadi statis, yang pada akhirnya akan sulit mengejar kemajuan bangsa lain. Itulah sebabnya Soekarno selalu berusaha menanamkan ideologi revolusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia. Dengan terus menerus mengadakan revolusi, bangsa Indonesia akan senantiasa bergerak maju secara cepat dalam segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, maupun bidang lainnya yang tidak disebutkan.

Motivasi ini juga melatari lahirnya ideologi yang melawan imperialisme dan kapitalisme. Secara semantis, imperialisme adalah sistem penjajahan langsung suatu negara terhadap negara lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik negara induk. Para penjajah tersebut menerapkan sistem kapitalis. Secara pragmatis, wujud imperialisme, yaitu penjajahan bangsa asing di Indonesia telah dihancurkan, yang puncaknya diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Walau demikian, Soekarno menyadari bahwa paham imperialisme akan terus ditunggangi oleh pihak tertentu untuk merongrong ketahanan dan keamanan, serta kedamaian bangsa Indonesia. Dengan senantiasa melawan Imperialisme, kemerdekaan dan kedamaian Indonesia akan terus tercipta dan bertahan untuk selamanya.

3. Perubahan Sosial Budaya Bangsa Indonesia

Analisis perubahan sosial budaya bangsa Indonesia merupakan bagian dari analisis level ketiga dari teori AWK Fairclough. Analisis ini dilakukan secara interpretatif berdasarkan kajian historikal bangsa Indonesia. Berdasarkan analisis ini, berikut ini dipaparkan perubahan sosial budaya bangsa Indonesia. Pembahasannya dibatasi pada dua aspek, yaitu (1) aspek perubahan sosial budaya dalam berkomunikasi, dalam hal ini menyangkut bahasa yang digunakan, dan (2) aspek cara hidup.

Pertama, dengan ideologi persatuan dan kesatuan, masyarakat Indonesia mengalami perubahan cara berkomunikasi, yaitu dalam hal berbahasa. Dari latar belakang suku, ras, dan kebudayaan yang berbeda, terdapat berbagai bahasa daerah yang berbeda dalam berkomunikasi. Perbedaan ini menjadi salah satu jurang pemisah. Walau demikian, Soekarno sebagai salah satu pendiri NKRI tidak menyerah dan terus berusaha merubah cara masyarakat berkomunikasi hingga pada akhirnya masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.

Seperti yang dicatat oleh sejarah, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu sudah dicetuskan sejak momentum sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Momentum bersejarah ini merupakan salah satu bibit kemerdekaan NKRI yang terlaksana melalui persatuan. Walau demikian, sulit dipungkiri bahwa momentum sumpah pemuda sebagai momentum lahirnya bahasa pemersatu tidak serta merta membuat seluruh masyarakat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Diperlukan sebuah perjuangan dengan tekad yang kokoh untuk meneruskan cita-cita luhur yang terkandung dalam sumpah pemuda. Perjuangan ini dilakukan oleh Soekarno dengan terus menyebarkan ideologi peratuan sebagai hal yang sangat penting. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, masyarakat Indonesia mulai lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, pada masa ini presentasi penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia lebih tinggi dari masa lampau. Perubahan ini merupakan momentum baik yang dapat dijadikan sebagai strategi pemersatu bangsa. Perubahan ini juga merupakan bentuk revolusi diri dan revolusi budaya bangsa. Seperti yang sudah dinyatakan, salah satu motor penggerak perubahan ini adalah ideologi dalam bahasa politik Soekarno.

Kedua, ideologi yang terkandung dalam bahasa politik Soekarno membawa perubahan pada cara hidup masyarakat Indonesia. Ideologi dimaksud adalah Ideologi permusuhan terhadap imperialisme. Penjajahan oleh kaum imperialis telah mempengaruhi cara hidup sebagian masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno menyinggung dan mencela orang-orang yang gaya hidupnya kebarat-baratan.

Secara historikal, pada jaman awal kemerdekaan, masih banyak rakyat Indonesia yang bangga jika berbicara dengan bahasa Belanda atau bahasa Inggris dibanding dengan bahasa Indonesia. Sebagian orang cenderung merasa lebih terhormat jika bersahabat dengan bangsa Eropa dibanding bersahabat dengan sesama orang Indonesia.

Gaya hidup seperti yang sudah disebutkan merupakan gaya hidup yang buruk karena tidak mencerminkan jiwa nasionalis. Inilah yang ditentang oleh Soekarno. Pada akhirnya, lambat laun masyarakat Indonesia mengalami perubahan dalam cara hidupnya. Selain rakyat

Indonesia mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang membanggakan, rakyat Indonesia juga mulai berubah menjadi bangsa yang mandiri, yang selalu bekerja keras demi mengisi kemerdekaan Indonesia.

Demikianlah pembahasan analisis data mengenai (1) Ideologi yang terkandung dalam bahasa politik Soekarno selaku salah satu tokoh pendiri bangsa dan proklamator kemerdekaan NKRI, (2) motivasi yang ada di balik lahirnya ideologi dalam bahasa tersebut, dan (3) perubahan sosial budaya sebagai dampak dari ideologi bahasa politik Soekarno.

PENUTUP

Pada bagian ini peneliti memaparkan simpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan di atas. Selanjutnya, peneliti memberikan usulan terkait dengan simpulan hasil penelitian dalam kaitannya dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa bahasa politik Soekarno mengandung tiga ideologi utama yaitu: (1) Persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang penting, (2) Revolusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, dan (3) Imperialisme dan kapitalisme adalah musuh utama bangsa Indonesia. Hal tersebut dilihat dari wacana ‘bagaimana Soekarno mengonstruksi bahasa dalam teks pidatonya’. Konstruksi dimaksud merupakan cermin dari cara berpikir serta sistem kepercayaan Soekarno selaku salah satu pendiri bangsa dan salah satu tokoh proklamator NKRI, serta penggagas dasar NKRI (Pancasila). Secara keseluruhan, gagasan utama yang mendominasi isi pidatonya adalah nilai- nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai- nilai revolusi bangsa yang harus dilakukan secara berkesinambungan, serta nilai- nilai yang menyatakan bahwa imperialisme dan kapitalisme adalah musuh utama bangsa Indonesia.

Motivasi yang melatari lahirnya muatan ideologi dalam bahasa politik Soekarno adalah sebagai berikut. *Pertama*, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural. Pluralisme bangsa Indonesia terdiri dari perbedaan latar belakang suku dan bahasa, perbedaan agama serta sistem kepercayaan, dan perbedaan letak geografis daerah. Bangsa yang plural perlu bersatu demi keutuhan NKRI. Itu sebabnya Soekarno berusaha ‘menghipnotis’ seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha ini merupakan usaha yang mulia mengingat NKRI yang terdiri dari daerah kepulauan serta latar belakang yang berbeda- beda akan mudah terpecah jika tidak menjunjung tinggi nilai- nilai persatuan dan kesatuan.

Kedua, sifat statis merupakan penghalang kemajuan bangsa Indonesia. Soekarno menyadari bahwa sifat statis akan membuat kemerdekaan bangsa ‘berjalan di tempat’. Oleh karena itu, Soekarno terus menanamkan ideologi dalam benak bangsa Indonesia untuk terus berevolusi. Antonim dari statis adalah dinamis. Dinamis merupakan sifat dasar revolusi. Dengan

menghidupi sifat ini, harapan akan ketahanan dan kemajuan bangsa Indonesia akan lebih mudah tercapai. Jika segenap bangsa Indonesia berupaya dan terus maju demi mengisi kemerdekaan bangsa, niscaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Itulah sebabnya Soekarno memiliki ideologi bahwa revolusi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.

Ideologi- ideologi tersebut telah membuahkan hasil yang dapat dilihat dari perubahan sosial budaya bangsa Indonesia. Dua perubahan dasar yang terlihat adalah perubahan dalam sistem komunikasi dan perubahan dalam cara hidup masyarakat. Perubahan dalam sistem komunikasi ditandai dengan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Perubahan ini sekaligus merupakan bagian dari perubahan cara hidup segenap rakyat Indonesia, yaitu dari rakyat yang hanya menguasai bahasa daerah, menjadi rakyat yang tidak hanya menguasai bahasa daerah namun juga menguasai bahasa Indonesia demi persatuan dan kesatuan bangsa. Di sisi lain, keadaan sebagian rakyat yang lebih membanggakan gaya hidup yang kebarat-baratan, secara berangsur mulai berubah dan menjadi lebih nasionalis. Pada akhirnya, di bawah ini peneliti memberikan beberapa usulan terkait hasil penelitian dan kondisi bangsa saat ini.

Fenomena sosial yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (Yuliono, 2013). Fenomena tersebut merupakan sebuah kenyataan yang menandakan adanya ketidak-percayaan masyarakat terhadap para penggerak roda partai politik, dalam hal ini para politikus. Jika masyarakat kurang mempercayai para pelaku politik, secara semantis dan secara filosofis dapat dimaknai bahwa masyarakat Indonesia kurang mempercayai bahasa para politikus. Ketidakpercayaan masyarakat, berdasarkan tinjauan peneliti, sangat beralasan ketika terkuak fakta bahwa penipuan berupa tindakan korupsi terbesar dilakukan oleh para politikus (Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2015, 2016). Data per tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 1.420 (32 %) terpidana kasus korupsi yang menipu menggunakan kendaraan politik. Jumlah ini merupakan jumlah pelaku penipuan (korupsi) tertinggi berdasarkan profesi.

Selaras dengan data tersebut, Bustan (2012) mengatakan bahwa para politikus selalu berbohong. Bustan (2012) mengutip pendapat Jason Jones dan Shan Waerthg (2007), yang mengatakan bahwa bahasa politik adalah pembelaan terhadap sesuatu yang tidak pantas dibela. Bahasa politik yang biasa digunakan para politisi dicirikan sebagai bahasa muslihat, karena dalam keseharian hidupnya, para politisi tidak pernah berhenti berbohong (bdk. Thomas dan Wareing, 2007). Menurut Bustan (2012), politisi sengaja menjatuh-jerembabkan masyarakat dalam gua dusta demi meraup keuntungan yang besar. Sejalan dengan Bustan (2012), Holan (2015), dalam tulisan opininya di Surat Kabar *New York Times*, mengatakan '*All politicians lie. Some lie more than others*', yang berarti semua politikus berbohong. Sebagian dari politikus tersebut berbohong

lebih dari yang lainnya. Pernyataan-pernyataan Bustan (2012) dan Holan (2015) menunjukkan adanya fenomena ketidakpercayaan terhadap bahasa para politikus belakangan ini.

Pada masa lampau, bahasa politik sangat disanjung dan berhasil membawa sebuah bangsa kepada kemerdekaan. Namun pada masa ini, bahasa politik pada umumnya dianggap sebagai kebohongan dan bualan yang tidak bisa dipercaya oleh masyarakat, dan dipakai untuk menista, menipu, dan mencuri uang rakyat. Hal ini merupakan ancaman bagi perdamaian dan ketahanan negara Indonesia. Seharusnya, jika pada masa lampau, seperti yang sudah diteliti, bahasa politik telah membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, maka pada masa sekarang bahasa politik seyogyanya mampu membawa semangat pembangunan dan memajukan bangsa yang sudah merdeka ini; bukan sebaliknya dianggap sebagai bualan belaka. Untuk itu, hasil penelitian yang menunjukkan ideologi di balik bahasa politik Soekarno ini diharapkan menjadi cermin bagi para politikus di masa ini. Diharapkan para politikus menganut ideologi yang memperjuangkan kepentingan umum, seperti yang dianut para pendiri bangsa, bukan sebaliknya.

Selanjutnya, berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, peneliti mengusulkan kepada seluruh pembaca agar kembali merenungkan ideologi yang dianggap penting oleh Soekarno selaku salah satu tokoh pendiri bangsa. Tanpa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia tidak dapat bertahan dalam kedamaian dan keamanan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan latar belakang suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda memiliki konsep bawaan dalam cara berpikir dan bertindak yang berbeda-beda. Walau demikian, hal itu tidak bisa dijadikan alasan perpecahan. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Di sisi lain, keanekaragaman tersebut perlu dikolaborasikan dengan ideologi persatuan dan kesatuan sebagai hal yang sangat penting bagi kelangsungan bangsa. ‘Bhinneka Tunggal Ika’, berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang lahir dari ideologi bahasa politik Soekarno. Semboyan ini sepatutnya diresapi dan dihidupi oleh segenap bangsa Indonesia. Musuh utama bangsa Indonesia bukanlah orang yang berbeda suku, ras, atau agama. Musuh utama bangsa Indonesia adalah paham imperialisme yang berusaha menjajah bangsa Indonesia dengan berbagai cara. Untuk itu, bangsa kita harus terus berevolusi. Sesuai himbauan presiden Jokowi, revolusi mental perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Usulan terakhir peneliti berkaitan dengan perubahan sosial budaya masyarakat, yaitu mengenai penggunaan bahasa Indonesia dan cara hidup masyarakat Indonesia. Bahasa sebagai objek vital penghadir makna mengandung kekuatan yang menakjubkan (Rakmat, 1994). Salah satu kekuatan makna yang terkandung dalam penggunaan bahasa adalah persatuan dan kesatuan jiwa. Pada tataran ini, penggunaan bahasa Indonesia merupakan sebuah strategi dalam mempersatukan segenap rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan yang berbeda-beda.

Revolusi penggunaan bahasa Indonesia perlu dilakukan, yaitu dari level menggunakan bahasa Indonesia secara baik menjadi level menggunakan bahasa Indonesia secara lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, niscaya jiwa nasionalis dari seluruh rakyat Indonesia semakin bertumbuh. Penggunaan bahasa Indonesia secara lebih baik juga perlu dibarengi dengan meninggalkan gaya hidup yang ‘kebarat- baratan’. Gaya hidup yang ‘kebarat- baratan’ merupakan wujud penjajahan imperialisme di masa moderen. Hal- hal yang sudah di sebutkan di atas merupakan sarana mencapai ketahanan, keamanan, dan perdamaian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustan F. (2012). *Politisi Selalu Berbohong*. Opini dalam <http://optimisme4all.blogspot.co.id/2012/09/politisi-selalu-berbohong.html>. Diunduh pada 17 February 2017.
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. New York: Longman Group.
- Fairclough, N. (1995a). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Fairclough, N. (1995b). *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse Norman Fairclough: Textual Analysisng for Social Reasearch*. London : Routledge.
- Fairclough, N. (2005). *Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research*. Londong: Routledge.
- Fairclough, N. (2006). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Fiske, J. (2012). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Jupriono. (2010). *Analisis Wacana Kritis Latar Historis Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* dalam Jurnal Parafrase Vol. 10, No. 02, September 2010, hal. 38-49.
- Jørgensen, M. dan Phillips, L. J. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*. London: SAGE Publications.
- Jørgensen, M. dan Phillips, L. J.(2010). *Analisis Wacana, Teori dan Metode*. Terj. Imam Suyitno, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kress, G. (1985). *Ideological Structure in Discourse*. Dalam: *Handbook of Discourse Analysis Vol.4*. Ed: Van Dijk. A.Teun 1985. Hlm.27-42 London:Academic Press.
- Latupeirissa, D. S. (2014). *Diskriminasi Gender Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia Di Surat Kabar Pos Kupang Dan Timor Express: Sebuah Analisis Wacana Kritis*. Tesis. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Rakhmat, J. (1994). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Scott, P. D. et al (2001). *100 Tahun Bung Karno: Sebuah Liber Amicorum*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Thomas, L. dan Shan W. (2007). *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thompson, J. B. (1984). *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. Yogyakarta : Ircisod.
- Thompson, J. B. (2004). *Kritik Ideologi Global Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. Yogyakarta : Ircisod.
- Thompson, J. B. (2005). *Filsafat Bahasa dan Hermeneutik*. Terj. Afandi. Surabaya: Visi Humanika.

- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2015. (2016). *Laporan Tahunan KPK Tahun 2015*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi.
- Van Dijk, T.A. (2001). *Principles of Critical Discourse Analysis, Discourse Theory and Practice: A Reader*. London: SAGE Publications Ltd.
- Yuliono, A. (2013). *Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik* dalam Jurnal Administrasi Publik, Juni 2013, Vol. 11, No. 1, Hal. 173 – 184.

